



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 44/Sal.Per/PHPU.WAKO/PAN.MK/01/2025  
Lampiran : 1 eksemplar  
Hal : Salinan Permohonan Perkara  
Nomor 193/PHPU.WAKO-XXIII/2025

06 Januari 2025

**Yth. Badan Pengawas Pemilihan Umum KOTA KENDARI**

sebagai Pemberi Keterangan

Jl. Chairil Anwar No.120, Mataiwoi, Kec. Wua-Wua, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93114

Kami, Panitia Mahkamah Konstitusi atas perintah Ketua Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, "Panitera menyampaikan salinan Permohonan kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dan Bawaslu sebagai tembusan, paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK". Ayat (2) menyatakan, "Penyampaian salinan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan permintaan Keterangan Tertulis kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota untuk diserahkan kepada Mahkamah sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan". Selanjutnya Pasal 33 ayat (2) PMK 3/2024 menyatakan, "Keterangan Bawaslu KOTA KENDARI disampaikan kepada Mahkamah paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Pemeriksaan Persidangan."

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan salinan Permohonan Perkara Nomor 193/PHPU.WAKO-XXIII/2025 perihal Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 serta meminta kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menyampaikan Keterangan Tertulis berkenaan dengan Permohonan a quo kepada Mahkamah paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Pemeriksaan Persidangan.

Demikian salinan Permohonan ini disampaikan oleh Panitia melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi.

**Plt. Panitera  
Muhidin**

Tembusan:

Yth. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

